

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

Benjamin Mangkoedilaga, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu Prospek di Masa Datang*, Angkasa, Bandung, 1988.

Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-empiris*, Alih Bahasa Drs. H. Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Imam Soebechi, dkk. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press, Yogyakarta, 2014.

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara*, Bogor, 1999.

-----, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni Bandung, 2004.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Maftuh Effendi, *Dinamika Yurisprudensi Peradilan Administrasi*, Pusaka Media, 2017, Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisus, Yogyakarta 1998.

Muchsan, *Sitem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.

Philipus M Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

-----, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

-----, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu Surabaya, 1987.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

-----, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1997.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta 2016.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, cetakan keenam, PT Alumni, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 1986.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni*, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Revisi III, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Yang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Z.A. Sangadji, *Kompetensi Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

B. Karya Ilmiah.

Febby Fajrurrahman, *Tindakan Diam Badan/ Pejabat Administrasi Perspektif Teori Hukum*, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII*, No. 380 Juli 2017, IKAHI, 2017.

Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Disertasi pada Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.

C. Putusan-Putusan.

Putusan Nomor: 04/P/FP/2016/PTUN-JKT, Tanggal 10 Pebruari 2016.

Putusan Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.PDG, Tanggal 20 Oktober 2017.

D. Sumber lainnya

Philipus M. Hadjon, Makna Sikap di Mata Hukum.

Dihttp://www.hukumonline.com. diakses pada tanggal 21 September 2017.

E. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

